

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Keaslian Penelitian	12
E. Kegunaan Penelitian	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. <i>Judicial Review</i>	19
1. Pengertian <i>Judicial Review</i>	19
2. Sejarah <i>Judicial Review</i>	21
3. <i>Judicial Review</i> oleh MK	25
4. Peran <i>Judicial Review</i> MK dalam Mekanisme <i>Checks and Balances</i>	33
B. Putusan MK	34

1. Pengertian Putusan MK	34
2. Jenis Putusan MK	36
3. Kekuatan Mengikat Putusan MK	48
4. Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi	50
5. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi	52
C. Teori Efektivitas Hukum	55
1. Pengertian Efektivitas Hukum	55
2. Teori Efektivitas Hukum	57
BAB III METODE PENELITIAN	63
A. Sifat Penelitian	64
B. Cara Penelitian	68
C. Cara Memperoleh Data	69
D. Jalannya Penelitian	73
E. Analisis Data	74
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	77
A. Pelaksanaan Putusan MK	77
1. Putusan Nomor 92/PUU-X/2012	77
2. Putusan Nomor 19/PUU-X/2012	84
3. Putusan Nomor 66/PUU-XI/2013	88
4. Putusan Nomor 18/PUU-I/2003	91
5. Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009	93
B. Alasan Putusan Mahkamah Konstitusi Ada yang Tidak Efektif dalam Pelaksanaannya	101

1. Putusan MK sangat Bergantung dengan Niat dari <i>Adressat</i>	
Putusan	101
2. Tidak Adanya Penegak Hukum dan Sarana Prasarana yang	
Menjamin Pelaksanaan Putusan MK	105
3. Putusan MK hanya Membatalkan ketentuan pada Undang-Undang	
yang Dimohonkan namun Tidak Berdampak pada Ketentuan	
Undang-Undang lain yang Memiliki Norma yang Sama	109
4. Pembuat Undang-Undang Memasukkan Kembali Norma yang	
Dibatalkan MK ke dalam Undang-Undang Perubahan	111
5. Sulitnya melakukan Implementasi dari Putusan MK	112
C. Solusi agar Putusan Mahkamah Konstitusi Tetap Efektif dan dapat	
dilaksanakan.	113
1. Fase Pembentukan Putusan	113
a. Larangan MK untuk Membuat Putusan yang Bersifat <i>Positive</i>	
<i>Legislator</i>	113
b. Putusan MK tidak boleh menggunakan Undang-Undang sebagai	
Dasar Pengujian	115
2. Fase Pelaksanaan Putusan	116
a. Optimalisasi Peran MK dalam proses legislasi terkait	
Pembentukan UU sebagai Tindak Lanjut Putusan MK	116
b. Optimalisasi Fungsi <i>Legislative Review</i> DPR terkait dengan	
Putusan MK	119
c. Pemberian Kewenangan <i>Judicial Order</i> pada MK	124

d. Adanya Mekanisme Sanksi yang Menjamin Pelaksanaan

Putusan MK 127

BAB V PENUTUP 130

A. Kesimpulan 130

B. Saran 133

DAFTAR PUSTAKA